



Penerapan Metode *Participatory Action Research* dalam Rencana Pengabdian kepada Masyarakat: Sebuah Studi Pustaka

Musyaffa^{1*}, Asnaini¹, Robeet Thadi¹, Indah Masruroh¹

¹Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

*E-mail: musyaffa@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Artikel Info	Abstrak
Diterima 14 Maret 2026	Artikel ini bertujuan untuk membahas penerapan metode <i>Participatory Action Research</i> (PAR) dalam perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa banyak program PkM masih menerapkan pendekatan <i>top-down</i> sehingga keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama perubahan belum optimal. PAR merupakan pendekatan transformatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial. Berbasis pada buku <i>Metodologi Pengabdian Masyarakat</i> yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, penelitian ini menganalisis landasan filosofis, prinsip kerja, siklus pelaksanaan, serta relevansi PAR dalam konteks PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan sintesis konseptual dan analisis kritis terhadap paradigma pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAR tidak hanya merupakan metode penelitian, tetapi juga paradigma epistemologis yang mengintegrasikan riset, aksi, dan refleksi dalam satu siklus perubahan sosial. Penerapan PAR dalam perencanaan PkM berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun kesadaran kritis, serta memperkuat kemandirian komunitas melalui integrasi pendekatan <i>Rapid Rural Appraisal</i> (RRA) dan <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA). Dengan demikian, PAR memiliki relevansi yang kuat sebagai pendekatan strategis dalam pengembangan model PkM berbasis pemberdayaan, khususnya di lingkungan PTKI.
Direvisi 22 Juni 2026	
Dipublikasikan 2 September 2026	
	Kata kunci: PAR, PkM, Pemberdayaan, Riset Transformatif, Partisipasi Masyarakat;

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

DOI: <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i2.13223>

P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347

Volume 8 Nomor 2, Juli - Desember 2026

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi telah mengalami pergeseran paradigma, dari model yang bersifat karitatif menuju model yang bersifat transformatif. Buku *Metodologi Pengabdian Masyarakat* menjelaskan bahwa paradigma baru PkM harus berlandaskan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pendekatan utama yang ditawarkan adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan pendekatan yang bertujuan mendorong proses pembelajaran dalam mengatasi permasalahan masyarakat, memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, menghasilkan ilmu pengetahuan, serta mewujudkan perubahan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, PAR merupakan pendekatan atau metode PkM transformatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (Agus Affandi, 2022: 4). Proses PAR mengusung prinsip "dari, oleh, dan untuk masyarakat", sehingga masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan keputusan dan mewujudkan perubahan sosial (Agus Affandi, 2022: 5).

Dalam penerapan metode PAR, pelaksanaannya tetap mengacu pada empat prinsip utama. Keempat prinsip tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, pengembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan sosial masyarakat (Afandi, 2022). Berdasarkan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa dosen dan mahasiswa berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat merupakan pelaku utama dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, perguruan tinggi berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi proses pemberdayaan, sementara masyarakat menjadi subjek yang menentukan arah dan keberlanjutan perubahan. Oleh sebab itu, keberhasilan maupun kegagalan suatu program sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip swadaya masyarakat yang telah dikenal sejak beberapa dekade lalu. Swadaya masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk organisasi, baik kelompok maupun lembaga masyarakat.

Paradigma pembangunan konvensional yang bercorak *developmentalisme* cenderung menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi komunitas lokal. Dalam konteks tersebut, *Participatory Action Research* (PAR) hadir sebagai alternatif metodologis yang memadukan proses penelitian dan aksi sosial secara partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep serta landasan filosofis metode PAR, mengkaji prinsip dan siklus kerja PAR dalam PkM, serta menilai relevansi dan implikasi penerapan PAR dalam pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Kajian ini difokuskan pada penerapan metode PAR dalam perencanaan PkM dan tidak membahas implementasi pendekatan lain, seperti *Community-Based Research* (CBR), *Service Learning* (SL), maupun *Asset-Based Community Development* (ABCD).

Relevansi metode PAR secara implementatif dapat menjadi alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Permasalahan yang kompleks memerlukan pendekatan yang sistematis dan partisipatif agar akar permasalahan dapat diidentifikasi secara komprehensif. Beberapa isu yang hingga kini masih menjadi perhatian utama, antara lain kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, permasalahan lingkungan serta pengelolaan sampah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pertama, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. *World Bank* pada Juli 2025 merilis laporan mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia masih tergolong miskin berdasarkan standar *World Bank*. Parameter yang digunakan adalah tingkat pendapatan individu per hari yang masih berada di bawah 6–7 dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, masyarakat dengan tingkat pendapatan dalam kisaran tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Laporan *World Bank* juga menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari lebih dari 61% menjadi sekitar 60% (Idris, 2025). Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47% pada akhir triwulan I tahun 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam dua puluh tahun terakhir (Sanjaya,

2025). Berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini tidak hanya memberikan bantuan sosial secara berkala, tetapi juga disertai pendampingan oleh Pendamping Sosial melalui berbagai kegiatan, seperti Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kelompok karya, dan program pemberdayaan lainnya.

Kedua, permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah. Permasalahan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah, menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia maupun kegiatan industri. Di Provinsi Bengkulu, kawasan hutan lindung, khususnya di wilayah perbukitan, mengalami deforestasi akibat pembalakan liar, pembukaan lahan secara masif, serta alih fungsi lahan dari hutan heterogen menjadi kawasan dengan vegetasi homogen. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor, mempercepat dampak perubahan iklim, meningkatkan suhu lingkungan, serta mengurangi habitat alami satwa liar yang dilindungi.

Permasalahan sampah, khususnya di kawasan perkotaan, hingga saat ini juga masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk mengurangi timbunan sampah melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti batako, *paving block*, maupun berbagai produk kerajinan. Pada tahap hilir, pemerintah dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah sebagaimana telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini. Selain itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas peduli lingkungan juga memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sebagai contoh, di Yogyakarta terdapat komunitas Krapyak Peduli Sampah, sedangkan di kalangan mahasiswa berkembang Komunitas Mahasiswa Peduli Sampah (*Lokalogi*). Dukungan terhadap keterlibatan perguruan tinggi juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan sampah di tanah air (Zaenuddin, 2026).

Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Laporan yang dirilis *Kompas.com* pada 17 Februari 2025 menunjukkan bahwa besarnya alokasi Dana Desa (DD) belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya partisipasi masyarakat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa selama satu dekade pelaksanaan program Dana Desa, pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp610 triliun untuk kepentingan pembangunan desa. Sejak tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,7 triliun, jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024 yang dialokasikan bagi 75.259 desa di 434 kabupaten/kota. Namun, besarnya alokasi dana tersebut belum diimbangi dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Hasil survei Litbang *Kompas* yang dilaksanakan pada 4–10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa enam dari sepuluh warga desa belum mengetahui keberadaan maupun pemanfaatan Dana Desa (Widyastuti, 2025). Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai ruang partisipasi masyarakat, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec), sebagai sarana penyusunan program pembangunan secara partisipatif.

Selain permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan sosial-keagamaan yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu, dosen perlu memetakan kompleksitas permasalahan keagamaan yang berkembang di masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan program PkM. Permasalahan tersebut tidak selalu berskala besar, tetapi juga mencakup persoalan yang bersifat lokal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid, terbatasnya kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, minimnya kajian keislaman untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat, serta kurangnya

pembekalan mengenai *fardu kifayah* bagi jemaah masjid. Berbagai permasalahan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat yang dapat menjadi fokus pemberdayaan melalui PkM.

Dalam konteks tersebut, PTKI memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan sosial-keagamaan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis masjid. Selain itu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam masih menyelenggarakan mata kuliah Praktik Dakwah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Praktik Dakwah yang melibatkan mahasiswa bersama dosen pembimbing lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi konsep kampus berdampak. Program tersebut mendapat respons positif dari berbagai pengurus masjid, khususnya di wilayah Kota Bengkulu, terutama ketika dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti menjadi pembawa acara, memandu pelaksanaan salat Isya dan Tarawih berjemaah, bertugas sebagai *bilal* dan *muazin*, menjadi imam salat, serta membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan, seperti peringatan Nuzulul Qur'an, pelaksanaan Salat Idul Fitri, dan pengelolaan zakat. Selain itu, mahasiswa juga berkontribusi dalam syiar Islam serta publikasi berbagai kegiatan masjid. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa program PkM yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat fungsi sosial perguruan tinggi.

Metode PAR dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Melalui metode ini, masyarakat didorong untuk mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan karena masyarakat menjadi subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Sebaliknya, PAR akan kurang efektif apabila proses pemberdayaan hanya bergantung pada keberadaan fasilitator, sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan setelah fasilitator tidak lagi mendampingi masyarakat.

Meskipun metode PAR telah banyak diterapkan dalam penelitian sosial, penerapannya secara konseptual dalam perencanaan program PkM di lingkungan PTKI masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi metode PAR secara sistematis dalam perencanaan PkM. Ruang lingkup kajian dibatasi pada penerapan metode PAR dalam perencanaan PkM yang dianalisis berdasarkan dua pendekatan riset.

Menurut buku *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, PAR adalah pendekatan PkM yang berorientasi pada pemberdayaan, produksi ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial keagamaan. PAR menempatkan masyarakat sebagai agen utama perubahan (Afandi, 2022). Hal ini sesuai QS. Ar-Ra'du ayat 11. Dalam ayat tersebut, Allah Swt berfirman, bahwa: *إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ* (sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada di diri mereka).

Sejarah perkembangan *Participatory Action Research* (PAR) tidak terlepas dari perkembangan *action research* yang dipelopori oleh sejumlah tokoh. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemikiran Bain, Boone, dan Buckingham memberikan kontribusi terhadap berkembangnya gerakan pendidikan dan metode ilmiah. Selanjutnya, Kurt Lewin mengemukakan bahwa berbagai persoalan sosial seharusnya menjadi fokus utama penelitian dalam ilmu sosial. Menurut Lewin, penelitian dilakukan melalui tahapan analisis sosial, identifikasi fakta, konseptualisasi, perencanaan, implementasi tindakan, serta evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Atas kontribusinya tersebut, Lewin kemudian dikenal sebagai pelopor *action research*. Pada periode 1950-an hingga 1960-an, *action research* mulai banyak diterapkan dalam penelitian di sektor industri. Istilah *action research* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Lewin pada tahun 1946 melalui artikelnya yang berjudul *Action Research and Minority Problems*. Konsep tersebut menempatkan tindakan sebagai bagian integral dari

proses penelitian yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan fakta, serta refleksi untuk menghasilkan pemahaman baru berdasarkan pengalaman sosial.

Selain Lewin, perkembangan *action research* juga dipengaruhi oleh tokoh lain, seperti Eric Trist, Lawrence Stenhouse, Antonio Gramsci, dan John Dewey. Pada dekade 1970-an, penelitian lapangan berkembang ke dalam empat model, yaitu *traditional action research*, *contextual action research*, *radical action research*, dan *educational action research* (Afandi, 2022). Lewin mengembangkan model *traditional action research*, Eric Trist mengembangkan *contextual action research*, Antonio Gramsci mengembangkan *radical action research*, sedangkan John Dewey dikenal melalui pengembangan *educational action research*. Dewey menekankan pentingnya keterlibatan aktif perguruan tinggi bersama para guru dalam berbagai proyek yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam metode PAR adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sivitas akademika berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Sebagai fasilitator, sivitas akademika perlu menghormati posisi masyarakat sebagai subjek utama yang menentukan arah perubahan. Oleh karena itu, seluruh proses pemberdayaan harus dilaksanakan secara partisipatif melalui kerja sama yang saling menguatkan. Pemberdayaan bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat sehingga tidak bergantung pada pihak lain. Apabila kemandirian tersebut telah terwujud, perubahan sosial akan berkembang secara berkelanjutan. Upaya pemberdayaan sebaiknya dimulai dari potensi yang telah dimiliki masyarakat, baik berupa nilai-nilai agama, budaya, sumber daya manusia, seperti pengalaman hidup, pengetahuan, dan kearifan lokal, maupun sumber daya alam. Berbagai potensi tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, fasilitator berperan mendorong masyarakat agar mampu mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Siklus kerja PAR dalam PkM berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi *to know* (mengetahui kondisi riil), *to understand* (memahami permasalahan), *to plan* (merencanakan tindakan), *to act* (melaksanakan tindakan), dan *to change* (melakukan refleksi serta mendorong keberlanjutan perubahan). Kelima tahapan tersebut membentuk suatu siklus yang bersifat spiral dan berkelanjutan sehingga setiap proses pembelajaran menjadi dasar bagi pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya.

Hosaini dan Rinwanto menjelaskan bahwa penerapan metode PAR didasarkan pada proses riset pendahuluan yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, fasilitator menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). *Rapid Rural Appraisal* merupakan pendekatan untuk melakukan pengkajian wilayah secara cepat dan sistematis guna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis, serta karakteristik sosial masyarakat yang didukung oleh data dan fakta lapangan (Hosaini & Rinwanto, 2020). Sementara itu, *Participatory Rural Appraisal* merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan perubahan dan mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pendekatan RRA berfungsi sebagai tahap awal untuk memperoleh data dan fakta lapangan secara komprehensif, sedangkan PRA memungkinkan fasilitator bersama masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan, merumuskan solusi, dan menyusun langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perubahan. Salah satu teknik yang umum digunakan dalam PRA adalah *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan forum diskusi yang melibatkan sejumlah informan atau pemangku kepentingan lokal untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi mengenai suatu permasalahan. Pelaksanaan FGD umumnya dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan jumlah peserta sekitar 6–12 orang, meskipun dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat (Hosaini & Rinwanto, 2020). Melalui FGD, fasilitator memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi

masyarakat sekaligus membangun kesepahaman dalam merumuskan alternatif penyelesaian masalah.

Meskipun istilah *rural* secara harfiah merujuk pada wilayah perdesaan dan berlawanan dengan *urban* yang mengacu pada wilayah perkotaan, pendekatan PAR pada hakikatnya tidak terbatas untuk diterapkan di wilayah desa. Prinsip-prinsip partisipasi, pemberdayaan, dan kolaborasi yang menjadi landasan PAR dapat diterapkan pada berbagai karakteristik masyarakat, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan permasalahan yang dihadapi.

Metode PAR dibangun atas tiga pilar utama. *Pertama*, membangun kedekatan dengan masyarakat melalui proses berbaur dan berinteraksi secara langsung sehingga fasilitator mampu memahami kondisi riil masyarakat. Pada tahap ini, fasilitator berperan sebagai pendamping yang menghormati masyarakat sebagai subjek utama serta melakukan triangulasi sumber untuk memperoleh data yang valid. *Kedua*, fasilitator menerapkan berbagai teknik partisipatif, seperti transek, diagram Venn, alur sejarah (*timeline*), analisis pemasaran, analisis mata pencaharian, pemeringkatan (*ranking*), dan berbagai teknik lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, seluruh proses dilaksanakan melalui kegiatan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran bersama antara fasilitator dan masyarakat (Hosaini & Rinwanto, 2020). Pendekatan RRA dan PRA memiliki sejumlah prinsip dasar, antara lain menghidupkan kembali proses belajar masyarakat, memperbaiki kesalahan melalui refleksi, menerapkan triangulasi, menghargai keragaman, mengutamakan proses fasilitasi, membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab masyarakat, serta mengembangkan budaya saling berbagi dalam proses pembelajaran bersama (Hosaini & Rinwanto, 2020).

RRA dan PRA merupakan dua pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi masyarakat secara cepat sekaligus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat didorong untuk mengenali potensi, menganalisis berbagai permasalahan, serta merencanakan pembangunan secara partisipatif. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi *mapping* (pemetaan), yaitu menggambarkan kondisi wilayah bersama masyarakat untuk mengidentifikasi sarana fisik maupun sosial; transek, yaitu penelusuran wilayah untuk mengamati kondisi lingkungan, sumber daya, dan penggunaan lahan; analisis sejarah desa untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dari masa ke masa; *trend and change* untuk menganalisis kecenderungan perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan; diagram Venn untuk mengidentifikasi hubungan antarlembaga atau para pemangku kepentingan; diagram alur (*flow diagram*) untuk menjelaskan proses kegiatan atau aliran sumber daya dalam masyarakat; kalender musim atau kalender harian untuk memahami pola aktivitas masyarakat berdasarkan musim maupun waktu; serta analisis pohon masalah dan pohon harapan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan, dan alternatif solusi yang diharapkan masyarakat. Berbagai teknik tersebut bertujuan memperoleh informasi secara partisipatif sehingga masyarakat mampu memahami kondisi yang dihadapi sekaligus menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Hosaini & Rinwanto, 2020).

Penerapan metode PAR telah dilakukan dalam berbagai kegiatan PkM. Salah satunya ditunjukkan oleh Khairul Umam dan rekan-rekannya yang melaksanakan PkM di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Mojokerto. Pada tahap *to know*, fasilitator mengidentifikasi kondisi geografis wilayah yang didominasi kawasan pegunungan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) (Umam, Khaerul, 2022). Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menguraikan secara eksplisit penerapan pendekatan RRA dan PRA sebagai bagian dari tahapan metode PAR sehingga aspek metodologisnya masih memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pahrurroji, Isnaeni, dan Muliyaningsih menunjukkan bahwa peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an masyarakat melalui pendekatan pendampingan partisipatif mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran keagamaan secara berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat melalui proses pendampingan yang melibatkan masyarakat secara aktif (Pahrurroji dkk., 2024).

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian mengenai kegiatan *khotmil* Al-Qur'an di TPQ At-Turob, Desa Junwangi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan berbasis komunitas mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Keberhasilan tersebut didukung oleh proses pembinaan dan pendampingan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan (Barkah dkk., 2025).

Penelitian mengenai pembinaan seni baca Al-Qur'an di Desa Keraskulon juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan di bidang pendidikan Al-Qur'an mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di tingkat desa. Selain meningkatkan kemampuan individu, program tersebut juga memperkuat interaksi sosial masyarakat dalam berbagai aktivitas keagamaan (Ulfa & Setianingrum, 2025).

Selain pendidikan Al-Qur'an, pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui berbagai program pendidikan keagamaan, seperti pesantren kilat bagi pemuda desa, program Magrib Mengaji, serta pelatihan pemulasaraan jenazah. Berbagai program tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran kolektif dalam menjalankan praktik keagamaan (Azis & Sunati, 2024; Kholijah dkk., 2025; Ali dkk., 2025; Thoriqul dkk., 2025).

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa PkM juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan komunitas yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Penelitian mengenai sinergi dakwah dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa binaan menunjukkan bahwa integrasi antara kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat mampu mendorong transformasi sosial secara lebih berkelanjutan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program pemberdayaan (Asmaria & Miranda, 2025).

Penelitian lain menunjukkan bahwa PkM juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan penguatan moderasi beragama di Desa Tambaksari menunjukkan bahwa kajian keagamaan yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan sosial (Lesmana dkk., 2024).

Selain melalui bidang keagamaan, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui program kesehatan. Penelitian mengenai penyuluhan agama Islam dalam penanggulangan *stunting* di Desa Rai Oi menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga dan pemenuhan gizi anak (Munir dkk., 2025).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa PkM dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian mengenai pelatihan desain grafis di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif (Azhari dkk., 2020).

Selain melalui bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, kegiatan PkM juga berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian mengenai pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran produk UMKM menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan media sosial mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil dalam

memasarkan produknya secara lebih luas sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Ahda dkk., 2026). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pengembangan konsep *smart village* yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan desa (Bahrudin & Supriyono, 2024).

Secara umum, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PkM berbasis pemberdayaan memiliki karakteristik yang sama, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan, berorientasi pada penyelesaian berbagai permasalahan sosial, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui proses pendampingan dan partisipasi aktif. Karakteristik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip metode PAR yang menekankan integrasi antara proses penelitian, tindakan, dan refleksi sebagai upaya mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi program PkM, sedangkan kajian yang secara khusus membahas penerapan metode PAR sebagai kerangka metodologis dalam tahap perencanaan PkM masih relatif terbatas. Selain itu, hasil telaah terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel telah menerapkan prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal* (PRA) melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemberdayaan. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit menguraikan tahapan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) sebagai proses eksplorasi awal kondisi masyarakat sebelum penyusunan program. Padahal, RRA merupakan salah satu tahapan penting dalam metode PAR untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan masyarakat sebagai dasar penyusunan program PkM. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan metode PAR dalam perencanaan PkM, khususnya di lingkungan PTKI, menjadi penting untuk dikembangkan guna menghasilkan model PkM yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Jika ditinjau berdasarkan karakteristik pendekatan RRA, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya tahapan eksplorasi awal sebelum pelaksanaan program PkM. Tahapan tersebut umumnya ditandai dengan kegiatan observasi lapangan, pemetaan kondisi masyarakat, identifikasi permasalahan, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta pengumpulan data awal secara cepat. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut dapat berupa identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis kondisi sosial, maupun survei awal lokasi PkM.

Beberapa penelitian telah mencerminkan aktivitas RRA meskipun tidak menyebutkan istilah tersebut secara eksplisit. Misalnya, penelitian Pahrurroji dkk. (2024) menunjukkan bahwa tim pengabdian melakukan identifikasi kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat serta observasi terhadap kondisi TPQ sebelum pelaksanaan program (Pahrurroji dkk., 2024). Demikian pula, penelitian Ahda dkk. (2026) diawali dengan analisis kondisi pemasaran UMKM dan identifikasi kebutuhan pelaku usaha sebelum pelaksanaan pelatihan (Ahda dkk., 2026). Penelitian Munir dkk. (2025) juga diawali dengan identifikasi kondisi kesehatan masyarakat serta analisis permasalahan *stunting* sebagai dasar penyusunan program pengabdian (Munir dkk., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar artikel sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip RRA secara implisit, meskipun tidak menjelaskan ataupun menyebutkan pendekatan RRA secara eksplisit sebagai bagian dari metodologi PkM.

Sebaliknya, hampir seluruh penelitian terdahulu secara jelas mencerminkan penerapan PRA. Pendekatan ini umumnya ditandai oleh pelaksanaan pelatihan, pendampingan, diskusi kelompok, berbagai kegiatan partisipatif, serta refleksi bersama masyarakat. Sebagai contoh, penelitian Ulfa dan Setianingrum (2025) melaksanakan pembinaan seni baca Al-Qur'an melalui pelatihan, praktik bersama, dan pendampingan masyarakat (Ulfa & Setianingrum, 2025). Program pendidikan Al-Qur'an yang melibatkan masyarakat, anak-anak, dan tokoh agama juga menunjukkan karakteristik PRA berbasis komunitas (Kholijah dkk., 2025). Demikian pula, pelatihan pemulasaraan jenazah yang melibatkan praktik langsung dan partisipasi masyarakat

mencerminkan penerapan PRA berbasis pelatihan (Ali dkk., 2025). Sementara itu, pelatihan desain grafis yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat merupakan bentuk penerapan PRA berbasis pemberdayaan kapasitas masyarakat (Azhari dkk., 2020).

Berdasarkan hasil telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian PkM telah menerapkan prinsip-prinsip PAR, khususnya melalui pendekatan PRA yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Namun, aspek RRA sebagai tahapan eksplorasi awal masih cenderung diterapkan secara implisit dan belum dijelaskan secara sistematis dalam bagian metodologi. Temuan ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat penerapan metode PAR melalui pengintegrasian tahapan RRA dan PRA secara utuh dalam perencanaan maupun pelaksanaan PkM.

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan paradigma penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-kritis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji, menganalisis, serta mensintesis berbagai konsep dan hasil penelitian mengenai penerapan metode PAR dalam PkM. Kajian ini bertujuan memperkaya dan memperkuat landasan konseptual mengenai penerapan metode PAR dalam perencanaan maupun pelaksanaan PkM.

Sumber data utama diperoleh dari dua buku yang secara khusus membahas metode PAR serta lebih dari dua puluh artikel ilmiah yang relevan. Artikel yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci "metode PAR" dan "PkM", dengan memprioritaskan publikasi dalam lima tahun terakhir. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, interpretasi, klasifikasi berdasarkan tema pembahasan, dan sintesis terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil sintesis tersebut kemudian digunakan untuk membangun argumentasi konseptual mengenai penerapan metode PAR dalam PkM.

Selain sumber data primer berupa buku dan artikel ilmiah, kajian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari prosiding ilmiah, publikasi media massa, media sosial, situs berita, serta sumber informasi lain yang relevan untuk memperkaya analisis. Seluruh sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus kajian dan digunakan secara kritis sebagai pelengkap dalam penyusunan pembahasan.

Tulisan ini juga sudah dipresentasikan dihadapan para akademisi lintas kampus. Selain penulis berasal dari UIN FAS Bengkulu, ada juga dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Diskusi intens berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026, Pukul. 08.00 – 10.00 Wib. Masukan dan kritikan atau saran dari peserta diskusi menjadi pertimbangan penulis untuk menyempurnakan kajian ini. Secara keseluruhan, tidak satupun peserta mempersoalkan analisis dan hasil dari kajian ini.

Hasil dan Pembahasan

Participatory Action Research (PAR) bukan sekadar metode teknis, melainkan paradigma epistemologis yang menolak relasi subjek–objek dalam penelitian sosial. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penelitian, tetapi sebagai *co-researcher* yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, melaksanakan tindakan, serta merefleksikan hasil yang dicapai. Paradigma tersebut selaras dengan pendekatan Islam transformatif yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembebasan dari ketertindasan struktural. Dalam konteks PkM, PAR memiliki relevansi strategis bagi PTKI karena mampu mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian, mengembangkan ilmu sosial-keagamaan yang bersifat emansipatoris, serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan PkM tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan berlangsung secara dialogis, kolaboratif, dan partisipatif.

Meskipun secara konseptual PAR menawarkan pendekatan yang ideal, implementasinya dalam program PkM masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering dijumpai meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan program, minimnya kapasitas fasilitator, resistensi masyarakat terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta budaya birokrasi akademik yang masih berorientasi pada pendekatan *top-down*. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penerapan PAR apabila partisipasi masyarakat hanya diposisikan sebagai pemenuhan aspek administratif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PAR tidak hanya ditentukan oleh penerapan tahapan metodologis, tetapi juga oleh integritas akademik, komitmen etis fasilitator, serta konsistensi dalam membangun kemitraan yang setara dengan masyarakat. Dengan demikian, PAR tidak hanya menjadi instrumen penelitian, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang mampu mendorong perubahan sosial secara berkelanjutan.

PAR memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya relevan untuk diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Salah satu keunggulan utamanya ialah tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan penelitian dan tindakan. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, melaksanakan tindakan, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Kondisi tersebut memungkinkan program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara fasilitator dan komunitas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial (Chevalier & Buckles, 2019). Selain itu, PAR mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) melalui keterlibatan langsung dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Proses tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara berkelanjutan. Karakter PAR yang reflektif dan siklikal, melalui tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara berulang, memungkinkan adanya perbaikan program secara berkesinambungan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat (Kemmis dkk., 2018).

Penerapan PAR dapat diilustrasikan melalui program PkM di sektor pertanian. Tim pengabdian bersama masyarakat terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai permasalahan, seperti rendahnya produktivitas hasil panen atau keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, fasilitator dan masyarakat kemudian merumuskan solusi secara bersama, misalnya melalui pelatihan pembuatan pupuk organik atau penerapan teknik irigasi sederhana. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan tersebut menjadikan program lebih tepat sasaran, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, serta mendukung keberlanjutan hasil pemberdayaan.

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, PAR juga memiliki sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaannya. Salah satu keterbatasan utama adalah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode penelitian konvensional. Hal ini disebabkan oleh proses partisipatif yang mencakup diskusi, musyawarah, serta refleksi bersama antara fasilitator dan masyarakat. Selain itu, proses membangun kepercayaan (*trust building*) dengan komunitas juga memerlukan waktu sehingga penerapan PAR tidak selalu mudah dilakukan pada program yang memiliki durasi pelaksanaan terbatas (Mackenzie dkk., 2012). PAR juga menghadapi tantangan dalam menjaga objektivitas penelitian karena fasilitator terlibat secara langsung dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan bias subjektif dalam interpretasi data maupun evaluasi program. Oleh karena itu, fasilitator perlu menerapkan refleksi kritis serta dokumentasi yang sistematis untuk menjaga validitas penelitian (De Oliveira, 2023).

Keterbatasan tersebut dapat dijumpai, misalnya, pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ketika tim pengabdian mengembangkan usaha mikro masyarakat, proses diskusi dengan berbagai kelompok kepentingan sering kali memerlukan waktu yang cukup

panjang karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tidak merata juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Pendekatan PAR sangat relevan diterapkan dalam program PkM di PTKI karena sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu misi utama perguruan tinggi. PAR memungkinkan dosen dan mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pemberi solusi secara *top-down*, tetapi juga sebagai mitra yang membangun kemitraan setara dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Selain itu, pendekatan ini mendukung integrasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi sehingga mampu menghasilkan program pemberdayaan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Selain itu, PAR memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai keislaman, seperti musyawarah, partisipasi, dan pemberdayaan umat. Melalui proses dialog dan refleksi bersama, masyarakat dapat berperan aktif dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan sosial, ekonomi, maupun keagamaan yang dihadapi. Dengan demikian, pendekatan PAR dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, dalam program PkM di PTKI, dosen dan mahasiswa dapat menerapkan metode PAR untuk meningkatkan literasi keagamaan dan ekonomi masyarakat di desa binaan. Melalui diskusi kelompok, masyarakat bersama tim pengabdian mengidentifikasi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan zakat produktif atau kewirausahaan syariah. Selanjutnya, masyarakat dan tim pengabdian menyusun program pelatihan serta pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial.

Salah satu contoh penerapan metode PAR dalam PkM ditunjukkan oleh penelitian mengenai pendampingan Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPQ) di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Mojokerto (Umam, Khaerul, 2022). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi geografis wilayah yang cukup menantang sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi dan pengembangan kurikulum pembelajaran Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, fasilitator membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai administrasi dan kurikulum TPQ. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran wali santri, yang ditunjukkan melalui keterlibatan yang lebih aktif, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran bulanan. Selain itu, para santri juga memperoleh buku saku sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran di TPQ.

Selanjutnya, fasilitator berkolaborasi dengan pengurus dan guru TPQ untuk mengidentifikasi serta merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum dan administrasi. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan berbagai informasi melalui kegiatan observasi dan identifikasi kondisi lapangan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah TPQ yang belum memiliki sistem administrasi dan kurikulum yang tertata dengan baik. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan pihak TPQ, tetapi juga melibatkan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya. Informasi yang telah diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan diskusi bersama guna merumuskan alternatif penyelesaian masalah. Tahap selanjutnya dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk menindaklanjuti hasil diskusi serta menyusun langkah-langkah pendampingan yang akan dilaksanakan. Proses tersebut bersifat siklikal sehingga dapat dilakukan secara berulang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

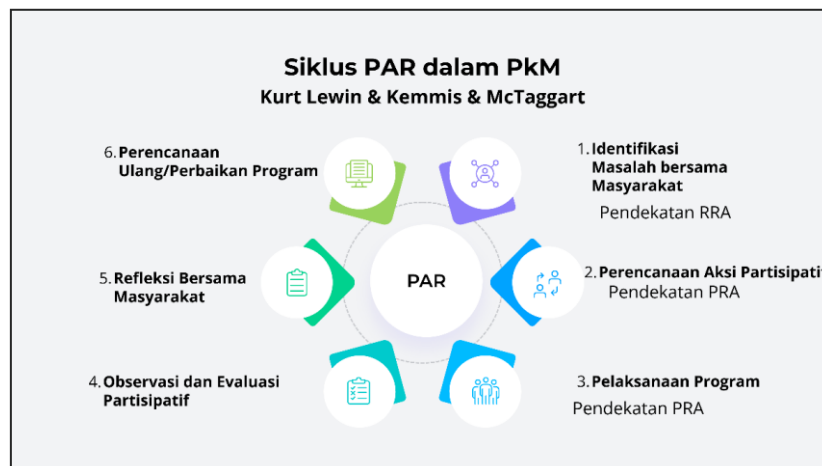
Pada tahap berikutnya, fasilitator berkoordinasi dengan pengurus TPQ untuk melaksanakan sosialisasi kepada wali santri mengenai administrasi dan kurikulum pembelajaran. Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah desa dalam menentukan lokasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, fasilitator bersama para pemangku kepentingan kembali melakukan diskusi dan evaluasi untuk

memperoleh masukan sebagai dasar penyempurnaan program pendampingan. Selanjutnya, seluruh pihak didorong untuk melaksanakan solusi yang telah disepakati secara bersama. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sebagian TPQ mampu menjalankan program pendampingan secara berkelanjutan, sedangkan sebagian lainnya belum mencapai hasil yang optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Gambaran mengenai rencana penerapan metode PAR dalam kegiatan PkM disajikan pada bagan berikut.



Gambar 1. Konsep Rencana Penerapan Metode PAR Berdasarkan Penelitian Umam
Sumber: Data olahan pribadi menggunakan Canva

Bentuk pengabdian Umam di atas belum secara eksplisit menjelaskan secara teknis prosedural. Bahkan, secara teoritis, penelitian tersebut belum sepenuhnya merujuk pada referensi ilmiah. Maka perlu ada siklus dalam menerapkan metode PAR saat kegiatan PkM nantinya. Sebagaimana tertera pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model PAR dalam PkM
Sumber: Data olahan pribadi menggunakan Canva

Secara sederhana, berdasarkan Gambar 2, penerapan metode PAR diawali dengan proses identifikasi permasalahan bersama masyarakat melalui pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana aksi yang disepakati bersama, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program. Setelah

implementasi program, fasilitator melakukan observasi, monitoring, dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan refleksi bersama terhadap seluruh proses yang telah dilaksanakan sebagai dasar penyusunan siklus perbaikan secara berkelanjutan.

Implikasi Akademik dan/atau Praktis

Artikel ini memiliki implikasi akademik dalam memperluas paradigma metodologi pengabdian berbasis riset, mengembangkan model pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), serta menghasilkan pengembangan teori yang berlandaskan praktik lapangan. Selain itu, kajian ini turut memperkuat paradigma pengabdian yang berbasis partisipasi melalui integrasi antara kegiatan penelitian dan PkM. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai penerapan metode PAR dalam kegiatan PkM.

Di samping implikasi akademik, kajian ini juga memiliki implikasi praktis, yaitu mendorong kemandirian komunitas, memperkuat kapasitas organisasi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan program berbasis komunitas. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi dosen dalam merancang dan melaksanakan program PkM yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan PAR. Dengan demikian, civitas akademika dapat menjalankan peran sebagai fasilitator berdasarkan kerangka konseptual dan metodologis yang sistematis, dengan tetap menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik objek serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kesimpulan

PAR merupakan pendekatan transformatif dalam PkM yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan sekaligus mitra dalam proses pemberdayaan. Melalui siklus yang partisipatif dan reflektif, pendekatan ini memungkinkan terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan pengetahuan kolektif yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial. Dalam implementasinya, efektivitas PAR sangat bergantung pada komitmen partisipatif seluruh pemangku kepentingan serta integritas fasilitator dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan. Pendekatan RRA dan PRA menjadi bagian penting dalam proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program PkM. Dengan demikian, PAR tidak hanya dipahami sebagai metode penelitian, tetapi juga sebagai paradigma pemberdayaan yang relevan dalam pengembangan model PkM berbasis partisipasi, khususnya di lingkungan PTKI.

Dalam pendekatan PAR, akademisi berperan sebagai fasilitator yang menjembatani proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aksi bersama masyarakat. Peran tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan PAR dalam kegiatan PkM sehingga dapat dihasilkan model pemberdayaan masyarakat yang semakin efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, tulisan ini selesai dan dapat dipublikasikan. Selanjutnya, saya mengucapkan terimakasih kepada Program Studi S3 Doktoral Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada tim pengajar yang mengampu mata kuliah Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat pada S3 Studi Islam Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi.

Pernyataan Kontribusi Penulis

M merupakan penulis utama artikel dalam tulisan ini. Selain itu, A sebagai penyuplai dana dan penguat literasi jurnal. Sementara itu, RT dan IM sebagai editor yang menyunting naskah ini sehingga layak untuk dipublikasikan.

Referensi

- Afandi, Agus. D. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (I). Diktis Dirjen Pendik Kemenag RI.
- Ahda, S., Cahyawati, S., Rahmawati, S. P., & Ummah, R. (2026). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Pemasaran pada UMKM “Alimah Laundry” di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 86–98. <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/1494>
- Ali, S., Maula, F. I., Hidayati, L. N., & Avivah, S. M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Balongjeruk Melalui Pelatihan Perawatan Jenazah: Studi Kasus Di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 6(2), 338–351 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPMD/article/view/2098>
- Asmaria, & Miranda, Z. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Islam melalui Pendekatan Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. *ABDI AKOMMEDIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(3), 19–24. <https://jurnal.akommedia.net/index.php/ABDIKOMMEDIA/article/view/147/90>.
- Azhari, W., Purwanto, AR, F. Y., & Pudail, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Desain Grafis di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren pada Masa Pandemi. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 487–493. <https://doi.org/10.25077/logista.4.2.487-493.2020>
- Azis, A. M., & Sunati, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan Islami Melalui Kegiatan Pesantren Kilat Pemuda Desa Ambang I. *TARSIUS: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis*, 6(2), 103–113. <https://doi.org/10.30984/tarsius.v6i2.1183>
- Bahrudin, U., & Supriyono. (2024). Pengembangan Smart Village Melalui Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu Menggunakan Metode Participatory Action Research. *SITASI: Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(1), 504–516. <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/890>
- Barkah, E. A. A., Musonawawi, M., & Alfiyah, H. Y. (2025). Menumbuhkan Rasa Cinta AL-Qur'an. *Al Murtado: Journal of Social Innovation and Community Service*, Vol., 1(1), 65–77. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almurtado/article/view/346>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry* (2nd Editio, hlm. 434). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351033268>
- De Oliveira, B. (2023). Participatory Action Research as a Research Approach: Advantages, Limitations and Criticisms. *Qualitative Research Journal*, 23. <https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2022-0101>
- Hosaini, & Rinwanto. (2020). *Pengantar Metodologi Partisipatory Action Research: Implementasi dan Contoh Penulisan Proposal, Penelitian, dan PkM berbasis PAR*. Bintang Pustaka Madani.
- Idris, M. (2025). *Data Bank Dunia: 60,3 Persen Penduduk Indonesia Hidup Miskin*. Kompas.com. Dipublikasi 1 Juni 2025 pada

<https://money.kompas.com/read/2025/06/01/081510726/data-bank-dunia-603-persen-penduduk-indonesia-hidup-miskin>

- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2018). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kholijah, S., Citrasari, S., Rangkuti, C., Damayanti, T., Hsb, I. E., Angriani, N. J., Dalimunte, M. R., Lubis, F., & Kaddar. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Magrib Mengaji Pada Anak - Anak Di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(1), 81–88. <https://languar.net/index.php/JUTEQ/article/view/9>
- Lesmana, B. N., Maulana, A., Mulyani, D., Susanti, D., Hafizhurrahman, M. R., Hasanah, N., Sulistio, R., Hayat, S. S., Syarifah, S., Widaningsih, W., & Adinugraha, Y. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kajian tentang Moderasi Beragama (Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis). *Khidmat*, 4(2). [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/37841?issue=Vol%204%20No%202%20\(2024\):%20Khidmat](https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/37841?issue=Vol%204%20No%202%20(2024):%20Khidmat)
- Mackenzie, J., Tan, P.-L., Hoverman, S., & Baldwin, C. (2012). The value and limitations of Participatory Action Research methodology. *Journal of Hydrology*, 474, 11–21. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.09.008>
- Munir, A., Susanti, R. A., Rahman, A., & Jayanti, M. I. (2025). Pemberdayaan Komunitas Melalui Penyuluhan Agama Islam Dalam Menanggulangi Stunting Di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.52266/taroa.v4i1.2949>
- Pahrurroji, Isnaeni, A., & Muliyaningsih, F. (2024). Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Masyarakat Jelupang Tangerang Selatan Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR). *JPPM: Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 03(01), 50–59. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i1.1825>
- Sanjaya, Y. C. A. (2025). *Kemiskinan Indonesia pada 2025 Terendah dalam 20 Tahun, BPS Bocorkan Penyebabnya*. Kompas.com. Publish 25 Juli 2025 pada <https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/26/140000265/kemiskinan-indonesia-pada-2025-terendah-dalam-20-tahun-bps-bocorkan>
- Thoriqul, H. M., Agustin, D. A. C., Hakim, R. W., Syayekti, E. I. D., Hanifah, F., Yasmin, Z., Ilham Abdullah, M., Nurhidayah, A., Prayoga, G., Muplihah, S., Nuriyatin Ningtyas, L., Aliffia Is Sya Agustina, A., Witanti, W., Yurista, K., Amrullah, F., Laila, N., Shofwah, S., Wulandari, P., Muhandis, A., ... Putri Alifia, A. (2025). Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Sebagai Upaya Transformasi Pengetahuan Keagamaan Bagi Ibu-Ibu Muslimat Desa Sidomulyo Kediri. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 89–102. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/ABDIANDAYA/article/view/2395>
- Ulfa, M., & Setianingrum, I. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembinaan Seni Baca Al-Qur'an di Desa Keraskulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. *Efada : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 160–170. <https://doi.org/10.54214/efada.vol2.iss02.939>

- Umam, Khaerul. (2022). Peningkatan Kualitas Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Melalui Metode Participatory Action Research (PAR). *JPPM: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4259>
- Widyastuti, R. Sri. D. (2025,). *Dana Desa Besar, Partisipasi Warga Kecil*. Kompas.id. Diakses pada 17 Februari 2025 pada <https://www.kompas.id/artikel/dana-desa-besar-partisipasi-warga-kecil>
- Zaenuddin, M. (2026). *Perguruan Tinggi Didorong Hadirkan Solusi untuk Masalah Sampah*. Kompas.com. Diakses pada 9 Februari 2025 pada <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2026/02/09/103000688/perguruan-tinggi-didorong-hadirkan-solusi-untuk-masalah-sampah>